

**IMPLEMENTASI PROGRAM LORONG WISATA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI LORONG KYOTO
KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA
MAKASSAR)**

Elza Rezky Saputry

NPP. 32.0886

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Email: elzarezkysaputry@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Jamaruddin, M.Ap, Ph.D

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Improving community welfare can be done by increasing community income through the development of the tourism sector. In this case, the Makassar City Government formed an idea in the tourism sector by maximizing the potential of the community in the alley by creating the Tourism Alley Program in Makassar City.*

Purpose: *The purpose of this study is to determine and describe the Implementation of the Makassar Mayor Regulation Policy No. 94 of 2022 concerning the Establishment of Tourism Alleys, to determine the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Tourism Alley Program, as well as the efforts made to overcome the inhibiting factors for the Implementation of the Tourism Alley Program in Kyoto Alley, Makassar City in increasing community income.*

Method: *The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques use observation, in-depth interviews (9 informants), and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

Results/Findings: *Based on the research results, the implementation of the Tourism Alley Program in Kyoto Alley, Makassar City has generally gone well.*

Conclusion: *The success of this program can be seen from the increase in income of people involved in economic activities in the tourist alley. For example, Sanggar Batara Gowa recorded an increase in income of around 20-25 percent. The Mega Baju Bodo rental business increased from IDR 2,500,000 to around IDR 4,000,000 per month. The Medan Nurul Pancake Durian UMKM experienced an increase of 15-20 percent, from IDR 5,000,000 to IDR 5,700,000-IDR 6,000,000. The income of the baruasa cake seller increased from IDR 2,000,000 to IDR 2,800,000 per month, while fried food sales increased from IDR 200,000-IDR 250,000 to IDR 300,000-IDR 400,000 per day. Meanwhile, the Kue Surabe UMKM recorded an increase from IDR 750,000 to IDR 1,500,000 per month. However, there are still obstacles, namely financial limitations in the form of a budget for developing the tourism alley program and the government's top-down program is not running optimally.*

Keywords: *Implementation, Increased Income, Tourism Alley*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): *Peningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Makassar membentuk suatu gagasan disektor pariwisata dengan*

memaksimalkan potensi masyarakat yang ada di lorong dengan membuat Program Lorong Wisata di Kota Makassar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar No 94 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lorong Wisata, mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Lorong Wisata, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Program Lorong Wisata di Lorong Kyoto Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam (9 informan), dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Lorong Wisata di Lorong Kyoto Kota Makassar secara umum sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Keberhasilan program ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di lorong wisata tersebut. Misalnya, Sanggar Batara Gowa mencatat kenaikan pendapatan sekitar 20–25 persen. Usaha penyewaan Mega Baju Bodo naik dari Rp2.500.000 menjadi sekitar Rp4.000.000 per bulan. UMKM Pancake Durian Medan Nurul mengalami peningkatan 15–20 persen, dari Rp5.000.000 menjadi Rp5.700.000–Rp6.000.000. Pendapatan penjual kue baruasa naik dari Rp2.000.000 menjadi Rp2.800.000 per bulan, sementara penjualan gorengan meningkat dari Rp200.000–Rp250.000 menjadi Rp300.000–Rp400.000 per hari. Adapun UMKM Kue Surabe mencatat kenaikan dari Rp750.000 menjadi Rp1.500.000 per bulan. Namun, masih adanya kendala yaitu keterbatasan finansial berupa anggaran dalam pengembangan program lorong wisata dan program top-down pemerintah tidak berjalan optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Peningkatan Pendapatan, Lorong Wisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu indikator penting yang dapat diukur melalui kemampuan individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa semakin seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat berhubungan erat dengan Tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah dengan menggunakan pengeluaran perkapita penduduk sebagai proksi pendapatan penduduk. (BPS Makassar, 2022). Selama periode 2019-2022 pengeluaran penduduk Kota Makassar berfluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran perkapita penduduk dari Rp 1.513.094 pada tahun 2019 menjadi Rp 1.489.084 pada tahun 2020. Pengeluaran kembali meningkat pada 2021 dan 2022 menjadi Rp 1.588.023 dan Rp 1.678.574. Hal ini berarti kondisi perekonomian mulai membaik pasca pandemi Covid-19.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Makassar membuat suatu program inovasi yang dinamakan dengan Program Lorong Wisata. Program Lorong Wisata merupakan salah satu dari delapan program strategis Pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Program ini dihadirkan sebagai solusi untuk memberdayakan lorong-lorong dengan menonjolkan keunikan budaya dan kearifan lokal.

Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kemandirian tanpa ketergantungan pada bantuan negara. Labolo, M. (2023). Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sendiri, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan warga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Lambelanova, R., & Jaelani, R. (2022). Program Lorong Wisata merupakan sebuah terobosan dari pembedayaan masyarakat yang memiliki peran cukup penting. Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar berupaya memberdayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu sasaran utama dari program ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap lorong, termasuk pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah tersebut. (Salsabila, 2023). Program Lorong Wisata dapat menjadi magnet untuk mempromosikan kekayaan budaya serta kearifan lokal Makassar kepada dunia luar, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Implementasi Program Lorong Wisata memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas di Kota Makassar. Program ini tidak hanya menjadi strategi untuk mempercantik lingkungan dan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku UMKM, program ini membantu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengoptimalan potensi di setiap lorong menciptakan peluang usaha baru, mengurangi pengangguran, dan memperkuat identitas budaya daerah.

Pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang beragam, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing masyarakat, tidak hanya dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam aspek penting lainnya seperti pendidikan dan infrastruktur. Sudarmono, S. (2021). Program Lorong Wisata di Kota Makassar khususnya di Lorong Kyoto menunjukkan potensi sebagai daya tarik yang menjanjikan. Namun, keberadaan lorong wisata belum sepenuhnya berhasil. Tantangan dalam pelaksanaan program ini antara lain adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait konsep Lorong Wisata. Sebagian warga belum sepenuhnya mengetahui tujuan serta manfaat dari program tersebut, sehingga hal ini berpotensi menghambat partisipasi mereka. Selain itu, keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dana, infrastruktur, maupun tenaga pelaksana yang juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Keberlanjutan program pun menjadi perhatian penting, karena manfaat jangka panjang dari lorong wisata hanya dapat tercapai jika ada komitmen kuat dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak yang terlibat. (Zona Sulsel, 2024).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program Lorong Wisata yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lorong berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, implementasi program ini, khususnya di Lorong Kyoto, belum sepenuhnya terdokumentasi secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroti aspek perbaikan lingkungan fisik dan partisipasi awal masyarakat, sementara pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor informal, belum banyak diteliti secara mendalam. Selain itu, penelitian yang mengkaji keberlanjutan program serta upaya konkret dalam mengatasi hambatan seperti keterbatasan dana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya akses pelatihan ekonomi masih sangat terbatas.

Program Lorong wisata ini cenderung berjalan dengan pendekatan top-down, yang kurang melibatkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahap implementasinya. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada implementasi Program Lorong Wisata di Lorong Kyoto dan perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menganalisis faktor pendukung, penghambat, serta solusi untuk memperkuat keberhasilan program secara berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian. Pertama, terdapat penelitian oleh Shinta Dance Indrawati (2024) dengan judul “Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasilnya menunjukkan bahwa implementasi inovasi Program Lorong Wisata cukup berhasil, namun terdapat kendala pada faktor individu, yaitu belum terdapat kesesuaian di lingkungan masyarakat dalam mengembangkan lorong wisata serta pada faktor struktur, yaitu program ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Kedua, penelitian oleh Asrianto, Rahmat Muhammad dan Nuvida Raf (2023) dengan judul “Perubahan Sosial Di Kelurahan Tello Barumelalui Program Lorong Wisata” menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan sosial yang terjadi sejak adanya lorong wisata di Kelurahan Tello Baru merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh relasi dualitas antara agen dan struktur. Dalam konteks ini, konsep dualitas menunjukkan hubungan yang dinamis antara peran agen yang aktif dan struktur yang berfungsi sebagai kerangka dalam pembentukan masyarakat. Ketiga, penelitian oleh A.Tasya Ameilia (2023) dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar” menggunakan metode kualitatif. Adapun Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata berjalan dengan cukup baik. Namun, beberapa indikator masih belum optimal, khususnya dalam aspek desain institusional. Selain itu, pengarsipan bukti kerja sama masih memerlukan dokumen fisik, dan dalam indikator proses kolaborasi, para pemangku kepentingan perlu memperkuat komitmen serta lebih mempertimbangkan masukan dari masyarakat guna mendukung perkembangan Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Keempat, penelitian oleh Pratiwi Wulandari (2024) dengan judul “Kebijakan Sosial Lorong Wisata Bagi Peningkatan Kesejahteraan” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan lorong wisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih memperlihatkan perbedaan antara lorong wisata yang sudah maju dan lorong wisata yang belum berkembang. Pewujudan kebijakan sosial pada tiap lorong yang berbeda serta partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Program Lorong Wisata tidak terlihat dikarenakan kebijakan bersifat top- down. Kelima, penelitian oleh Muh. Nurfauzi Iksan (2023) dengan judul “Efektivitas Program Lorong Wisata Di Kota Makassar” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata mendapatkan penilaian positif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun, rendahnya tingkat pendidikan di beberapa kalangan masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka. Program ini juga memberikan dampak positif bagi berbagai pihak salah satunya dengan perubahan lorong yang sebelumnya kumuh dan bau kini menjadi bersih, indah, dan produktif. Keenam, penelitian oleh Merdiana Megantari Gartiwi, R. Ira Irawati, Nina Karlina (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kurang efektifnya penerapan implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh berbagai unsur yang termasuk dalam isi kebijakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian mengenai Program Lorong Wisata telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus seperti, perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan. Seperti penelitian oleh

Asrianto, Muhammad dan Nuvida (2023) yang membahas mengenai perubahan sosial yang terjadi sejak adanya lorong wisata di Kelurahan Tello Baru, Wulandari (2024) menyoroti mengenai kesejahteraan masyarakat yang masih memperlihatkan perbedaan antara lorong wisata yang sudah maju dan lorong wisata yang belum berkembang.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Grindle (1980), yang dilihat dari dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat terjadi melalui program lorong wisata, , dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus untuk mengetahui apa faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar khususnya Lorong Kyoto.

1.5. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar khususnya Lorong Kyoto dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Dengan metode kualitatif deksriptif tersebut, peneliti memiliki tujuan dalam mengungkap berbagai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian secara terurut dan berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan. (Wekke, 2019:24)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menguraikan secara sistematis implementasi program Lorong Wisata, faktor pendukung dan penghambat serta upaya pemerintah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kota Makassar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan realitas di lapangan berdasarkan data empiris yang diperoleh selama proses observasi dan wawancara. Kemudian, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Hardani et al. (2020:112) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive dan snowball sampling sebanyak sembilan informan yang sudah ditetapkan sesuai dengan pedoman wawancara.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara tersebut penulis secara mendalam melakukan diskusi terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Lurah Parang Tambung, Dewan Lorong Kyoto dan masyarakat. Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Miles dan Huberman dalam Sidiq (2019:78).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Lorong Wisata

Penulis dalam menganalisis implementasi program lorong wisata di Lorong Kyoto Kelurahan Parang Tambung Kota Makassar menggunakan pendapat Merilee S. Grindle (1980), bahwa implementasi kebijakan publik dikatakan berhasil apabila diukur dengan sebuah proses pencapaian hasilnya. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

a. Isi Kebijakan

Pada dimensi pertama yaitu isi kebijakan terdapat 6 aspek yang dianalisis meliputi:

1. Kepentingan kelompok sasaran

Pemerintah Kota Makassar sebelum menetapkan sebuah lorong sebagai bagian dari lorong wisata, terlebih dahulu dilakukan diskusi awal dengan masyarakat setempat. Melalui forum-forum yang telah terbangun di tingkat bawah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka mengenai lorong yang akan dijadikan objek wisata. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program lorong wisata di Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, karena rasa kebersamaan dan keterlibatan yang telah terbangun sejak awal terbentuknya lorong wisata.

2. Tipe Manfaat

Dalam implementasi kebijakan, sangat penting untuk memastikan adanya manfaat yang jelas sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pengembangan pariwisata sudah jelas untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. (Zheng et al., 2021). Manfaat ini mencerminkan dampak positif yang timbul setelah kebijakan diimplementasikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu manfaat yang dirasakan ialah dengan adanya perubahan yang signifikan pada lorong tersebut, yang sebelumnya tidak terawat, kotor menjadi lebih indah dan tertata dengan baik. Perbaikan ini tidak hanya mengubah tampilan lorong yang lebih baik, tetapi juga membuat lorong menjadi lebih nyaman bagi masyarakat yang tinggal di lorong kyoto. Selain perubahan itu, keberadaan program ini juga mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di lorong kyoto

3. Derajat Perubahan yang Diharapkan

Implementasi yang efektif akan menghasilkan output optimal dalam jangka pendek maupun panjang secara konsisten dan terstruktur serta harus memiliki skala yang jelas. Dampak berkelanjutan, program ini yang berjalan secara konsisten. Salah satunya adalah membuka peluang ekonomi bagi pemuda setempat, seperti bekerja sebagai juru parkir saat ada kegiatan di sanggar. Selain itu, warga di Lorong Wisata Kyoto juga berkesempatan belajar tari secara gratis, sehingga memperkuat dampak sosial program ini.

4. Letak Pengambil Keputusan

Pengambilan keputusan memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan mengenai tata kelola pariwisata harus melibatkan kolaborasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan lainnya. (Minasi et al., 2021). Keputusan ini berkaitan erat dengan para stakeholders dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berorientasi pada kepentingan bersama. Letak pengambilan keputusan pada kebijakan program Lorong Wisata Kyoto terdapat pada Pemerintah setempat yaitu Lurah Parang Tambung, RW, RT dan juga Dewan Lorong Kyoto serta Bersama masyarakat Lorong.

5. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan aspek penting dalam sebuah kebijakan, karena para pelaksana berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaksanaan program lorong wisata memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya pendapatan Sanggar Seni Batara Gowa karena mampu menarik lebih banyak pengunjung. Selain itu, program ini juga mendorong perkembangan UMKM, seperti usaha penyewaan baju adat (baju bodo) dan pancake durian. Berkat program ini, masyarakat semakin mengenal tempat penyewaan baju adat tersebut. Pemerintah turut mendukung dengan memberikan bantuan berupa neon box bagi usaha pancake durian,

membantu promosi, serta memperbaiki fasilitas jalan guna mempermudah akses kepada para pelaku usaha.

6. Sumber Daya yang Digunakan

Dalam pelaksanaan implementasi program lorong wisata sangat dipengaruhi oleh seberapa baik sumber daya yang dibutuhkan, dikelola dan dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. sumber daya utama dalam program ini adalah sumber daya manusia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. (Surya et al., 2020). Masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dan dibekali pelatihan oleh dinas terkait untuk mendukung UMKM, pariwisata, dan kesenian. Program tidak berbasis bantuan dana tunai, tetapi mengandalkan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan fasilitas fisik.

b. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Kolaborasi antar berbagai aktor pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam keberhasilan program. Meskipun setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda, koordinasi yang baik dan strategi yang tepat memungkinkan sinergi yang menghasilkan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, melalui berbagai dinas terkait, berperan penting dalam menyediakan fasilitas dan program pelatihan yang mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh karakteristik lembaga penguasa, seperti Pemerintah Kota Makassar, meskipun belum tersedia sistem penyampaian keluhan yang formal seperti aplikasi atau website, mekanisme penyampaian aspirasi secara berjenjang melalui dewan lorong masih berjalan dengan cukup efektif.

3. Tingkat Kepatuhan dan Respon

Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, menunjukkan hasil yang positif. Kepatuhan yang tinggi dari berbagai dinas dalam menyusun rencana strategis dan merespons kebutuhan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang baik, memperlihatkan bahwa program ini diterima dengan antusiasme tinggi. Respon positif dari masyarakat, terutama yang merasakan dampak langsung terhadap usaha mereka, semakin memperkuat keberlanjutan dan keberhasilan program ini. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana serta masyarakat juga tergolong tinggi, yang terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam kegiatan lorong seperti pengecatan lorong, partisipasi saat adanya pelatihan, dan penyuluhan. Sinergi antara kekuasaan, kepentingan, struktur kelembagaan, serta antusiasme masyarakat menjadikan lingkungan implementasi program ini kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan berbasis komunitas secara berkelanjutan.

3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Lorong Wisata Kyoto di Kota Makassar

a. Faktor pendukung yang berperan dalam implementasi program ini, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Komitmen yang baik antar pelaksana kebijakan program lorong wisata kyoto, dengan melibatkan berbagai pihak memastikan bahwa keputusan diambil secara partisipatif, bukan sepihak oleh pemerintah setempat. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan warga, sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lorong wisata.

2. Adanya dukungan pemerintah, dukungan pemerintah memungkinkan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih mudah. Setiap bentuk komunikasi yang diperlukan dalam penyampaian informasi program dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat agar dapat bekerja sama secara sinergis.
 3. Tingginya kesadaran masyarakat terkait program lorong wisata di Lorong Kyoto, kesadaran masyarakat terhadap program tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam setiap kegiatan, terutama saat menerima kunjungan. Mereka dengan sigap mempersiapkan berbagai aspek, seperti produk UMKM dan hasil kerajinan lokal, yang menunjukkan rasa memiliki serta komitmen dalam mengembangkan lorong wisata.
- b. Faktor penghambat, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi lorong wisata di Lorong Kyoto:
1. Keterbatasan finansial, dalam penyaluran finansial mengakibatkan banyak sarana dan prasarana yang sepenuhnya belum dapat dibenahi. Masyarakat juga membutuhkan bantuan finansial berupa modal usaha agar dapat meningkatkan usaha mereka.
 2. Program Top-Down pemerintah tidak berjalan optimal, ketika kegiatan kurang relevan atau kurang menguntungkan secara ekonomi bagi warga, maka minat untuk melanjutkan kegiatan tersebut pun menjadi rendah.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Program Lorong Wisata di Lorong Kyoto Kota Makassar

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi faktor penghambat, diantaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi bantuan organisasi perangkat daerah dalam pemberdayaan masyarakat lorong bertujuan agar masyarakat tetap memperoleh dukungan dalam bentuk bantuan fasilitas, atau bimbingan teknis
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lorong wisata dengan mengajak masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengembangkan sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan serta keberlanjutan lorong wisata secara lebih efektif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian oleh Shinta Dance Indrawati (2024) dengan judul Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar mengungkapkan terdapat kendala pada faktor individu, yaitu belum terdapat kesesuaian di lingkungan masyarakat dalam mengembangkan lorong wisata. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa di Lorong Kyoto Kelurahan Parang Tambung Kota Makassar dalam hal kesesuaian juga masih ditemukan hanya sebagian kecil individu yang mampu menyesuaikan. Hal itu terjadi karena individu tersebut memperoleh keuntungan dari program ini. Pada penelitian sebelumnya di faktor struktur, yaitu program ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan, dalam penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa struktur terbentuk berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah pemerintah dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Asrianto, Rahmat Muhammad dan Nuvida Raf (2023) dengan judul Perubahan Sosial Di Kelurahan Tello Barumelalui Program Lorong Wisata. Hasil penelitian ini yaitu perubahan sosial yang terjadi sejak adanya lorong wisata di Kelurahan Tello Baru merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh relasi dualitas antara

agen dan struktur. Penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa perubahan sosial terjadi hanya dipengaruhi oleh struktur dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh A.Tasya Ameilia (2023) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata berjalan dengan cukup baik. Namun, beberapa indikator masih belum optimal, khususnya dalam aspek desain institusional. Selain itu, pengarsipan bukti kerja sama masih memerlukan dokumen fisik, dan dalam indikator proses kolaborasi, para pemangku kepentingan perlu memperkuat komitmen serta lebih mempertimbangkan masukan dari masyarakat guna mendukung perkembangan Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa tingginya kolaborasi pemangku kebijakan dengan masyarakat terkhusus pada proses pembentukan lorong wisata sehingga administrasi lorong wisata yaitu Lorong Kyoto bisa terpenuhi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Wulandari (2024) dengan judul Kebijakan Sosial Lorong Wisata Bagi Peningkatan Kesejahteraan. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan lorong wisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih memperlihatkan perbedaan antara lorong wisata yang sudah maju dan lorong wisata yang belum berkembang. Pewujudan kebijakan sosial pada tiap lorong yang berbeda serta partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Program Lorong Wisata tidak terlihat dikarenakan kebijakan bersifat top-down. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Lorong Kyoto telah termasuk dalam salah satu lorong wisata yang maju dengan lorong yang memiliki konsep budaya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nurfauzi Iksan (2023) dengan judul Efektivitas Program Lorong Wisata Di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata mendapatkan penilaian positif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Program ini juga memberikan dampak positif bagi berbagai pihak salah satunya dengan perubahan lorong yang sebelumnya kumuh dan bau kini menjadi bersih, indah, dan produktif. Penelitian yang dilakukan penulis mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam implementasi program lorong wisata memberikan dampak positif salah satunya peningkatan pendapatan masyarakat dan juga mengubah kawasan kumuh menjadi lebih bersih dan indah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Merdiana Megantari Gartiwi, R. Ira Irawati, Nina Karlina (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian menemukan bahwa kurang efektifnya penerapan implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh berbagai unsur yang termasuk dalam isi kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa yang menjadi unsur terbesar kurang efektifnya implementasi kebijakan program lorong wisata adalah keterbatasan anggaran,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980), secara umum pelaksanaan lorong wisata di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung Implementasi Program Lorong Wisata di Lorong Kyoto Kota Makassar adalah komitmen yang baik antar pelaksana kebijakan Program Lorong Wisata Kyoto, adanya dukungan pemerintah, dan tingginya kesadaran masyarakat terkait Program Lorong Wisata di Lorong Kyoto. Adapun faktor penghambat implementasi program lorong wisata di lorong kyoto kota makassar adalah keterbatasan finansial berupa anggaran dalam pengembangan program lorong wisata. Pemerintah Kota Makassar telah berupaya mengatasi faktor penghambat implementasi

program lorong wisata di lorong kyoto kota makassar dengan optimalisasi bantuan organisasi perangkat daerah dalam pemberdayaan masyarakat lorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lorong wisata

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penulisan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan ataupun penelitian dengan peneliti lainnya pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi program lorong wisata di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memperoleh jawaban yang lebih maksimal dalam menjawab setiap rumusan masalah yang ada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Lurah Parang Tambung, Dewan Lorong Kyoto dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781400886081_A29559370/preview-9781400886081_A29559370.pdf.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.). CV. Pustaka Ilmu. https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=EOveEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=vSdhvdluxS&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>.
- Lambelanova, R., & Jaelani, R. (2022). Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863>.
- Sidiq, U., & Choiri, Moh. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Sudarmono, S. (2021). *Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. CV. Putra Surya Santosa. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/950>.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Gawe Buku. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL/tr etDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+DASAR+KAJIAN+PENELITIAN&printsec=frontcover.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Ameilia, A. T. (2023). Collaborative Governance Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/30522>.
- Asrianto, Muhammad, R., & Raf, N. (2023). Perubahan Sosial di Kelurahan Tello Baru Melalui Program Lorong Wisata. *Jurnal Noken : Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 117–130. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2973>.

- Gartiwi, M. M., Irawati, R. I., & Karlina, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41126>.
- Iksan, Muh. N. (2023). Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar. *37921-Full Text.pdf*.
- Indrawati, S. D. (2024). Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/33795>.
- Minasi, S. M., Kaizer, É. F., & Oliveira, R. M. (2021). Social participation and tourism public policy: The brazilian tourism regionalization program. *Enlightening Tourism*, 11(1), 231–262. <https://doi.org/10.33776/et.v11i1.5128>.
- Salsabila, N. S. (2023). Implementasi dan Perkembangan Lorong Wisata Pada UPT Pengelolaan Event Kepariwisata di Dinas Pariwisata Kota Makassar. <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/1389/1/NURUL%20SAFFA%20SALSABILA%20BWS23.pdf>.
- Surya, B., Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. (2020). Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187324>.
- Wulandari, Pratiwi. (2024). Kebijakan Sosial Lorong Wisata Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota Makassar. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/34951>.
- Zheng, M. Y., Chen, C. C., Lin, H. H., Tseng, C. H., & Hsu, C. H. (2021). Research on the impact of popular tourism program involvement on rural tourism image, familiarity, motivation and willingness. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13094906>.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata.

SUMBER LAIN

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2023). *Statistik Daerah Kota Makassar 2023*. <https://makassarkota.bps.go.id/>. Diakses 17 November 2024.
- Zona Sulsel. (2025). <https://zonasulsel.com/2024/07/26/akademisi-unm-teliti-dampak-program-lorong-wisata-di-makassar/>. Diakses pada 03 Mei 2025.